

PERAN PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA EDUKASI KETAKASI DI SIDOMULYO JEMBER

Wahyu Iqbal Ma'ruf¹, I Ketut Mastika², Selfi Budi Helpiastuti³, Sigit Kariyanto⁴

^{1,2,3}Universitas Jember, Jember, Indonesia

⁴Universitas Moch. Sroedji, Jember, Indonesia

Email: wahyu.iqbal.wi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Edukasi Ketakasi di Desa Sidomulyo, Kabupaten Jember. Topik ini penting karena pariwisata berbasis komunitas menjadi strategi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, terutama pada sektor agrowisata kopi yang menjadi potensi utama desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator melalui kebijakan wisata, penyediaan infrastruktur, kemitraan strategis, serta pemberdayaan pemuda dan promosi digital. Masyarakat turut berpartisipasi aktif melalui Pokdarwis dan Gerakan Pemuda Sidomulyo dalam pengelolaan kebun kopi edukatif, edukasi pengunjung, dan promosi berbasis media sosial. Temuan penelitian ini berdampak pada penguatan tata kelola kolaboratif di tingkat desa, yang mendorong pengembangan wisata edukatif yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi teknis yang aplikatif dan penguatan kapasitas kelembagaan sebagai prasyarat keberlanjutan wisata berbasis komunitas.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Collaborative Governance; Agrowisata, Ketakasi.

Abstract

This study aims to analyze the role of the village government and community participation in developing the Ketakasi Educational Tourism in Sidomulyo Village, Jember Regency. The topic is important because community-based tourism has become a key strategy for achieving inclusive and sustainable rural development, particularly through coffee-based agrotourism as the village's main potential. This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results reveal that the village government plays multiple roles as a regulator, facilitator, catalyst, and dynamizer through policy formulation, infrastructure provision, strategic partnerships, youth empowerment, and digital promotion. The community actively participates through Pokdarwis (tourism awareness group) and the Sidomulyo Youth Movement in managing educational coffee plantations, guiding visitors, and promoting tourism through social media. The findings contribute to strengthening collaborative governance at the village level, fostering inclusive and sustainable educational tourism development. The study highlights the need for applicable technical regulations and institutional capacity strengthening as prerequisites for sustaining community-based tourism.

Keywords: Village Government, Community Participation, Collaborative Governance, Agrotourism, Ketakasi.

A. PENDAHULUAN

Kajian tentang peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata telah banyak dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Hidayat & Djadjuli (2020) menemukan bahwa peran pemerintah desa Raksabaya sebagai penggerak pengembangan wisata Curug Kembar sudah berjalan baik dalam penyediaan infrastruktur, namun masih terbatas pada perencanaan teknis dan kurang dalam pelibatan masyarakat secara menyeluruh. Sementara itu, Ramdayanti, Argenti & Marsingga (2021) menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pembinaan dan pelatihan, meskipun keberlanjutannya masih bergantung pada dukungan anggaran.

Penelitian Sri Mulyani & Basrowi (2023) menunjukkan bahwa modal sosial dan partisipasi masyarakat berperan sebagai faktor mediasi dalam hubungan antara peran pemerintah dan pembangunan pariwisata, namun konteksnya masih terbatas pada wilayah perkotaan Sidoarjo. Studi lain oleh Uhai (2021) menyoroti kontribusi organisasi masyarakat sadar wisata (MASATA) dalam mengembangkan desa wisata di Kalimantan Timur melalui pendampingan dan pembinaan kapasitas lokal. Di sisi lain, Patadungan, Tasik, dan Purwanto (2020) menegaskan bahwa pengembangan wisata di Pantai Pulisan melibatkan pemerintah dan masyarakat, tetapi belum memiliki mekanisme evaluasi partisipatif yang terstruktur.

Beberapa studi terbaru juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata masih berorientasi pada kegiatan fisik dan operasional. Penelitian oleh Handayani (2024) menegaskan bahwa motivasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan wisata dipengaruhi oleh aspek kebersihan dan kenyamanan, sedangkan penelitian Triananda, Maweikere, dan Memah (2021) menemukan bahwa faktor kekuatan dan kelemahan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengembangan ekowisata di Desa Bahoi, Sulawesi Utara. Sementara itu, Putra, Hasim, dan Adianto (2022) menggunakan pendekatan *collaborative governance* untuk menganalisis pengembangan wisata di Rupert Utara, namun fokusnya masih pada dinamika kolaborasi lintas lembaga tanpa menguraikan peran spesifik pemerintah desa dan masyarakat lokal.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai studi tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian menitikberatkan pada peran pemerintah desa secara umum sebagai penyedia kebijakan dan fasilitas, tanpa mengelaborasi empat peran strategis yang lebih komprehensif yakni sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator (Waldo, 1948; Adhiwati, 2012). Kedua, aspek partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sering kali dibahas dalam konteks operasional atau ekonomi semata, belum mengarah pada bagaimana partisipasi tersebut mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ketiga, kajian yang mengintegrasikan peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007) masih sangat terbatas, khususnya di konteks desa berbasis agrowisata edukatif.

Desa Sidomulyo di Kabupaten Jember memiliki karakteristik unik sebagai desa devisa penghasil kopi robusta sekaligus desa wisata yang berkembang pesat melalui program *Wisata Edukasi Ketakasi*. Pengelolaan destinasi ini melibatkan pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pokdarwis, dan Gerakan Pemuda Sidomulyo (GPS) yang berperan aktif dalam kegiatan promosi, edukasi kopi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pengelolaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya regulasi teknis, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan ketimpangan partisipasi antar kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Edukasi Ketakasi Sidomulyo, dengan menggunakan perspektif *collaborative governance* sebagai kerangka analisis. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator; (2) mengidentifikasi bentuk

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata edukatif; dan (3) mengevaluasi dinamika kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur administrasi publik dan tata kelola kolaboratif di tingkat desa, serta menjadi acuan praktis bagi pengembangan model pengelolaan desa wisata berbasis agrowisata edukatif di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan Wisata Edukasi Ketakasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Desain ini dipilih karena sesuai untuk menggali proses sosial dan interaksi antaraktor yang terlibat dalam tata kelola pariwisata berbasis komunitas. Ruang lingkup analisis difokuskan pada kebijakan, praktik kelembagaan, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ketakasi sebagai destinasi agrowisata edukatif berbasis kopi robusta.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat Desa Sidomulyo, termasuk lembaga-lembaga lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan Gerakan Pemuda Sidomulyo (GPS). Seluruh unit ini dianalisis dalam konteks kolaborasi desa untuk mengembangkan pariwisata edukatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap 12 informan utama, terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, pengurus BUMDes, pengelola Ketakasi, anggota Pokdarwis, pemuda GPS, dan pelaku usaha mikro di sekitar lokasi wisata. Observasi dilakukan dengan mengikuti aktivitas wisata, rapat pengelola, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan dokumentasi mencakup Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2022, notulen musyawarah desa, publikasi media sosial, dan laporan kegiatan wisata.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) yang menggunakan pedoman wawancara berdasarkan teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2007) dan konsep empat peran pemerintah desa (Waldo, 1948; Adhiwati, 2012), yaitu sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi empat tahap: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data melalui seleksi dan penyederhanaan informasi yang relevan, (3) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan kutipan wawancara, serta (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi dan refleksi mendalam.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari perangkat desa, pengelola, dan masyarakat; triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi; sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengulangan wawancara pada periode yang berbeda. Validitas juga diperkuat melalui member checking kepada informan utama untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dan pandangan narasumber.

C. HASIL PENELITIAN

1. *Collaborative Governance* pada Pelaksanaan Pariwisata Partisipatif di Desa Sidomulyo

Fenomena pengembangan Wisata Edukasi Ketakasi di Desa Sidomulyo menunjukkan munculnya gejala sosial kolaboratif yang khas di tingkat desa. Pemerintah desa, lembaga

ekonomi desa, komunitas pemuda, dan masyarakat petani kopi terlibat dalam proses pengelolaan yang tidak sekadar berbasis peraturan, tetapi juga berdasar pada nilai sosial dan kepercayaan antaraktor. Gejala ini menandai pergeseran dari tata kelola administratif menuju tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), di mana kebijakan publik tidak hanya dihasilkan melalui otoritas pemerintah, melainkan melalui proses negosiasi sosial di dalam komunitas.

Pada awalnya, wisata edukasi Ketakasi dibentuk untuk memanfaatkan potensi kopi robusta sebagai daya tarik wisata lokal. Namun, seiring waktu, proses pengelolaan berkembang menjadi arena interaksi sosial yang kompleks. Pemerintah desa tidak lagi berperan sebagai pusat pengambil keputusan tunggal, melainkan sebagai mediator antaraktor lokal. Masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi objek kebijakan, kini mengambil peran aktif dalam menentukan arah pengelolaan wisata. Fenomena ini memperlihatkan adanya redistribusi peran dan kekuasaan di tingkat lokal, di mana relasi antaraktor menjadi lebih horizontal dan partisipatif.

Dalam konteks teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), pola hubungan ini mencerminkan fase *starting conditions* dan *trust building* yang penting dalam pembentukan kolaborasi. Proses musyawarah, pertemuan informal, dan gotong royong dalam mengelola fasilitas wisata menjadi sarana untuk membangun kepercayaan sosial (*social trust*) antaraktor. Kepercayaan ini muncul bukan karena peraturan formal, tetapi karena pengalaman bersama dalam mengelola kegiatan wisata. Ini adalah bentuk *trust by doing*, di mana kepercayaan dibangun dari praktik sosial yang berulang dan hasil nyata di lapangan.

Kepercayaan sosial tersebut berfungsi sebagai modal sosial utama dalam mempertahankan keberlanjutan wisata edukatif. Ketika aturan formal belum cukup kuat atau belum disusun secara rinci, masyarakat mengandalkan komunikasi terbuka dan norma gotong royong untuk menjaga keseimbangan peran. Kondisi ini memperlihatkan *institutional void*—kekosongan kelembagaan formal yang kemudian diisi oleh inovasi sosial komunitas. Dalam pandangan Waldo (1948), situasi seperti ini menunjukkan bahwa administrasi publik di tingkat lokal tidak hanya bekerja melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui nilai-nilai moral dan partisipatif yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, pola kolaborasi di Ketakasi menampilkan negosiasi kepentingan yang dinamis. Pemerintah desa berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan memanfaatkan kelembagaan informal seperti Pokdarwis dan kelompok pemuda GPS untuk menjembatani komunikasi antaraktor. Negosiasi ini membentuk ruang deliberatif, yaitu ruang sosial di mana keputusan dihasilkan melalui diskusi terbuka dan kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, kekuasaan bukan sekadar dimiliki oleh pemerintah desa, tetapi menjadi hasil interaksi yang bersifat *shared power*.

Fenomena sosial yang muncul di lapangan juga menunjukkan adanya ketergantungan timbal balik (*mutual interdependence*) antara pemerintah dan masyarakat. Desa membutuhkan partisipasi masyarakat agar wisata tetap hidup dan berkelanjutan, sedangkan masyarakat memerlukan legitimasi dan dukungan kebijakan dari pemerintah desa. Hubungan timbal balik ini merupakan karakter utama tata kelola kolaboratif sebagaimana digambarkan oleh Ansell dan Gash (2007), di mana keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh keseimbangan antara sumber daya, kepercayaan, dan komitmen bersama.

Dalam praktiknya, bentuk kolaborasi ini menghadirkan identitas sosial baru bagi masyarakat Sidomulyo. Melalui wisata edukatif, warga mulai memaknai dirinya sebagai bagian dari komunitas wisata yang memiliki tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian budaya dan sumber daya lokal. Transformasi identitas ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menciptakan perubahan sosial—dari masyarakat agraris menjadi masyarakat kolaboratif berbasis pengetahuan.

Sinkronisasi antara teori dan temuan empiris memperlihatkan bahwa *collaborative governance* di Desa Sidomulyo tidak hanya mengafirmasi teori Ansell dan Gash (2007), tetapi juga menambah nuansa baru dalam konteks pedesaan Indonesia. Kolaborasi di tingkat desa tidak selalu muncul dari kebijakan yang dirancang formal, melainkan sering kali lahir dari nilai-nilai sosial yang telah lama hidup di masyarakat, seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Dengan demikian, kasus Sidomulyo memperluas pemahaman bahwa tata kelola kolaboratif tidak harus dimulai dari desain kelembagaan yang mapan, tetapi dapat tumbuh dari praktik sosial yang adaptif dan berbasis nilai-nilai lokal.

2. Transformasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Partisipatif

Perubahan tata kelola pariwisata di Desa Sidomulyo menandai munculnya transformasi sosial dalam fungsi pemerintahan desa. Pemerintah desa tidak lagi berperan sebagai pelaksana administrasi semata, tetapi berkembang menjadi aktor kolaboratif yang menghubungkan kepentingan masyarakat, pelaku ekonomi, dan lembaga sosial. Gejala sosial yang terlihat di lapangan menunjukkan pergeseran paradigma birokrasi desa dari pola *rule-based governance* menjadi *value-based governance*, yaitu pemerintahan yang berorientasi pada nilai, kepercayaan, dan kolaborasi.

Transformasi ini dapat dipahami melalui empat peran utama pemerintah desa sebagaimana diuraikan oleh Adhiwati (2015), yakni sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator. Namun di Sidomulyo, keempat peran ini tidak hadir secara terpisah, melainkan saling berkelindan dan membentuk pola relasi sosial yang dinamis di antara aktor lokal.

Sebagai regulator, pemerintah desa menetapkan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pengelolaan wisata edukatif. Akan tetapi, pada praktiknya, peran regulatif ini tidak hanya bersifat legal-formal, melainkan juga sosial. Ketika aturan tertulis belum mampu menjangkau kompleksitas lapangan, masyarakat bersama pengelola wisata menciptakan mekanisme informal melalui kesepakatan, musyawarah, dan norma sosial. Fenomena ini memperlihatkan *institutional adaptation* — gejala sosial di mana masyarakat berperan aktif dalam menyesuaikan struktur formal dengan kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa proses regulasi di tingkat desa merupakan hasil negosiasi sosial, bukan semata implementasi kebijakan dari atas ke bawah.

Dalam pandangan Waldo (1948), praktik semacam ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemerintah desa Sidomulyo menjalankan fungsi regulatifnya bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menjaga legitimasi sosial di mata warganya. Dengan kata lain, peraturan di Sidomulyo tidak berhenti pada teks hukum, melainkan menjadi simbol kepercayaan dan kesepakatan moral antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai fasilitator, pemerintah desa memainkan peran kunci dalam membuka ruang partisipasi dan membangun kapasitas warga. Fasilitasi dilakukan tidak hanya dalam bentuk pelatihan dan dukungan sarana, tetapi juga melalui pembentukan jejaring antaraktor. Kegiatan seperti pelatihan pengolahan kopi, pengemasan produk, hingga pengelolaan wisata berbasis digital memperlihatkan upaya pemerintah desa menumbuhkan kepercayaan diri kolektif masyarakat (*collective self-efficacy*). Masyarakat mulai berani berinovasi, membentuk kelompok usaha, dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Gejala sosial ini menunjukkan pergeseran dari ketergantungan menuju kemandirian sosial-ekonomi yang tumbuh melalui pembelajaran kolektif.

Fungsi fasilitatif ini memperkuat teori Ansell dan Gash (2007) bahwa *collaborative governance* menuntut adanya *capacity building* dan *trust-building* di antara aktor lokal. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung dan penggerak yang menjembatani kepentingan antaraktor agar kolaborasi dapat berjalan seimbang. Di Sidomulyo, proses ini tidak hanya

menghasilkan kolaborasi ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan relasional (*relational equity*), yaitu kesetaraan posisi antaraktor dalam menentukan arah pembangunan wisata.

Sebagai katalisator, pemerintah desa memunculkan energi sosial baru di masyarakat. Dukungan terhadap kelompok pemuda GPS (Gerakan Pemuda Sidomulyo) dan komunitas kreatif desa mendorong terbentuknya inovasi sosial seperti Festival Kopi dan promosi wisata berbasis digital. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memperkuat identitas sosial kolektif warga Sidomulyo sebagai masyarakat wisata edukatif. Dalam konteks sosiologis, fenomena ini merupakan bentuk *cultural redefinition* — proses di mana masyarakat mendefinisikan ulang identitasnya melalui partisipasi dalam aktivitas kolaboratif.

Peran katalisator ini memperlihatkan bahwa birokrasi desa mampu bergerak melampaui fungsi administratif. Pemerintah tidak lagi sekadar “mengatur,” melainkan “menggerakkan.” Dalam pandangan Waldo (1948), peran semacam ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan kemanusiaan menjadi bagian integral dari praktik administrasi publik. Pemerintah desa tidak hanya menjadi instrumen negara, tetapi juga agen perubahan sosial yang mendorong partisipasi warga.

Sebagai dinamisator, pemerintah desa Sidomulyo berupaya menjaga kontinuitas kolaborasi dengan membangun komunikasi lintas generasi dan sektor. Kepala desa dan perangkatnya secara aktif terlibat dalam kegiatan lapangan, menghadiri rapat pengelola, serta mendorong partisipasi perempuan dan pemuda dalam kegiatan wisata. Gejala sosial yang muncul adalah terbentuknya jaringan sosial adaptif (*adaptive social network*) yang memudahkan aliran informasi dan keputusan di tingkat komunitas.

Pendekatan ini mencerminkan praktik *governance of proximity*, yaitu tata kelola yang mengandalkan kedekatan sosial dan keterlibatan langsung pemerintah dengan warganya. Melalui mekanisme ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah desa meningkat, dan masyarakat lebih mudah menerima kebijakan yang dihasilkan.

Jika dilihat dari perspektif *collaborative governance*, keempat peran pemerintah desa tersebut membentuk ekosistem sosial yang saling melengkapi. Regulasi yang adaptif memberikan legitimasi kelembagaan, fasilitasi memperkuat kapasitas, katalisasi mendorong inovasi sosial, dan dinamisasi menjaga keberlanjutan partisipasi. Semua proses ini menghasilkan transformasi nilai dalam tata kelola pemerintahan desa—dari orientasi administratif menuju orientasi kolaboratif berbasis kepercayaan dan pembelajaran sosial.

Dengan demikian, gejala sosial yang paling menonjol dalam konteks Sidomulyo adalah perubahan makna peran pemerintah desa itu sendiri. Desa tidak lagi dipahami sebagai struktur yang memerintah, tetapi sebagai ruang moral tempat aktor-aktor sosial bernegosiasi, berinovasi, dan belajar bersama. Transformasi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan wisata partisipatif tidak ditentukan oleh kuatnya aturan, tetapi oleh kemampuan pemerintah desa untuk menjadi mediator nilai-nilai sosial dan katalis perubahan komunitas.

3. Pergeseran Partisipasi Masyarakat dari Fungsional ke Interaktif

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Edukasi Ketakasi memperlihatkan gejala sosial yang menarik, yakni terjadinya pergeseran pola keterlibatan masyarakat dari partisipasi bersifat instrumental menuju partisipasi yang lebih reflektif dan interaktif. Pergeseran ini menunjukkan perubahan struktur sosial dalam masyarakat Sidomulyo—dari hubungan hierarkis antara pemerintah dan warga menuju relasi kolaboratif yang setara.

Pada fase awal pengembangan wisata, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk kerja bakti, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan fisik lainnya. Partisipasi ini bersifat fungsional, karena warga hanya terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tanpa berperan dalam pengambilan keputusan. Namun, seiring perkembangan wisata edukatif, masyarakat mulai memunculkan inisiatif dan kesadaran baru. Mereka tidak lagi sekadar “bekerja untuk program,” tetapi

“bekerja dalam program” sebagai bagian dari proses sosial yang lebih luas. Fenomena ini memperlihatkan gejala sosial berupa kesadaran kolektif (*collective awareness*) tentang pentingnya keterlibatan dalam menentukan arah pembangunan wisata.

Transformasi partisipasi ini dapat dijelaskan dengan teori tipologi partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Pretty (1995). Pada awalnya, masyarakat Sidomulyo berada pada tahap *functional participation*—dimana partisipasi dimobilisasi oleh pihak luar untuk mendukung program tertentu. Namun kini partisipasi tersebut telah berkembang menuju *interactive participation*, di mana masyarakat terlibat aktif dalam analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Bahkan, pada beberapa inisiatif seperti pengembangan produk kopi olahan dan promosi digital, partisipasi warga telah mencapai tahap *self-mobilized participation*, di mana tindakan kolektif muncul secara mandiri tanpa intervensi pemerintah desa.

Pergeseran ini juga dapat dilihat dari pola relasi kekuasaan (*power relation*) di tingkat lokal. Dulu, keputusan terkait wisata sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa atau kelompok elite tertentu. Kini, muncul bentuk *redistribusi kekuasaan sosial*, di mana warga biasa, pemuda, dan pelaku UMKM lokal memiliki suara yang diakui dalam proses perencanaan wisata. Dalam kerangka teori Arnstein (1969) tentang tangga partisipasi (*ladder of participation*), fenomena ini menunjukkan pergeseran dari tahap *tokenism* menuju *citizen power*.

Gejala sosial yang tampak di lapangan memperkuat interpretasi tersebut. Misalnya, keterlibatan pemuda melalui kelompok GPS (Gerakan Pemuda Sidomulyo) yang mengelola promosi digital, pelatihan kopi, dan kegiatan wisata edukatif, menunjukkan pembentukan struktur sosial baru berbasis pengetahuan dan jejaring digital. Para pemuda ini tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga agen perubahan yang membawa inovasi dan menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Dalam konteks sosiologis, hal ini merupakan bentuk *social innovation* yang lahir dari interaksi lintas generasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Partisipasi perempuan juga mengalami perubahan signifikan. Kelompok ibu rumah tangga tidak lagi sekadar terlibat dalam kegiatan konsumtif atau pelayanan, tetapi telah mengembangkan produk kreatif seperti batik bermotif kopi dan kerajinan tangan berbasis identitas lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya penguatan peran sosial perempuan dalam ekonomi desa dan pergeseran persepsi tentang gender dalam ruang publik. Dalam perspektif teori Scheyvens (1999) tentang pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata, kondisi ini merepresentasikan dimensi *psychological* dan *economic empowerment* sekaligus—di mana partisipasi meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi perempuan desa.

Namun, perubahan sosial ini tidak berlangsung seragam. Muncul juga gejala ketimpangan partisipasi antara kelompok muda yang melek teknologi dengan kelompok tua yang masih terikat pada pola tradisional. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah kemampuan teknis, tetapi menunjukkan adanya perbedaan akses terhadap pengetahuan (*knowledge gap*) yang menjadi faktor pembatas dalam pemerataan partisipasi. Masyarakat yang memiliki akses informasi dan jaringan sosial lebih luas cenderung menjadi *change agent*, sementara yang lain masih berada pada posisi penonton atau penerima manfaat.

Meski demikian, adanya ketimpangan partisipasi ini tidak berarti kolaborasi gagal. Dalam kerangka Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007), kondisi tersebut justru menandakan bahwa proses kolaborasi berada dalam tahap penyesuaian, di mana kepercayaan dan kapasitas antaraktor sedang dibangun secara bertahap. Pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang lebih kuat secara sosial berperan sebagai *bridging actors* untuk menjembatani kelompok lain agar tidak terpinggirkan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat Sidomulyo dapat dikatakan bersifat adaptif dan progresif—tidak statis, tetapi terus bergerak menuju bentuk yang lebih deliberatif dan setara.

Selain itu, dinamika partisipasi di Sidomulyo juga memperlihatkan terbentuknya modal sosial (*social capital*) yang kuat. Kepercayaan antarwarga, jaringan komunikasi informal, dan budaya gotong royong menjadi sumber kekuatan kolektif yang menopang keberlanjutan wisata. Modal sosial ini menciptakan mekanisme kontrol sosial internal yang lebih efektif dibandingkan pengawasan formal. Dalam perspektif Putnam (1993), kondisi ini memperlihatkan bahwa modal sosial bukan hanya hasil dari kebijakan, melainkan prasyarat bagi keberhasilan kolaborasi itu sendiri.

Dengan demikian, transformasi partisipasi masyarakat Sidomulyo menggambarkan pergeseran dari partisipasi instrumental menuju partisipasi reflektif dan deliberatif. Gejala sosial yang paling menonjol bukan hanya meningkatnya keterlibatan warga dalam kegiatan wisata, tetapi munculnya kesadaran baru tentang kepemilikan bersama (*collective ownership*) terhadap destinasi wisata. Masyarakat tidak lagi melihat wisata sebagai milik kelompok tertentu atau program pemerintah, melainkan sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata edukatif di Sidomulyo bukan semata hasil kebijakan formal, melainkan buah dari proses sosial panjang yang membangun kepercayaan, solidaritas, dan kapasitas kolektif.

4. Tantangan dan Peluang dalam Kolaborasi Desa Wisata

Kolaborasi dalam pengembangan Wisata Edukasi Ketakasi di Desa Sidomulyo merupakan proses sosial yang dinamis dan kompleks. Di balik keberhasilan menciptakan destinasi berbasis masyarakat, terdapat beragam tantangan sosial, kultural, dan kelembagaan yang menyertai. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya berupa persoalan teknis atau administratif, tetapi menyentuh dimensi yang lebih dalam: kepercayaan, keadilan, dan representasi sosial.

Salah satu gejala sosial yang menonjol adalah fragmentasi partisipasi antaraktor lokal. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki tingkat keterlibatan yang sama. Pokdarwis dan kelompok pemuda (GPS) berperan aktif dalam pengelolaan wisata, sedangkan sebagian warga masih bersikap pasif dan melihat kegiatan wisata sebagai urusan kelompok tertentu. Fenomena ini menggambarkan *asymmetric collaboration* — kolaborasi yang berjalan, tetapi belum sepenuhnya setara. Dalam kerangka teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007), kondisi ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif di Sidomulyo masih berada pada tahap *face-to-face dialogue* dan *trust building*, belum sepenuhnya mencapai *shared understanding*.

Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan kelembagaan formal. Meskipun telah ada Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2022 sebagai dasar hukum, implementasinya di lapangan masih bersifat adaptif. Pengawasan, pembagian keuntungan, dan tata kelola aset wisata lebih banyak dilakukan melalui kesepakatan informal. Gejala sosial ini menandakan bahwa tata kelola Ketakasi masih bergantung pada kepercayaan antarindividu ketimbang sistem yang terlembaga. Situasi ini memperlihatkan apa yang disebut Ansell & Gash (2007) sebagai *weak institutional design*, lembaga kolaborasi yang berjalan berdasarkan kepercayaan sosial, bukan pada prosedur administratif.

Namun demikian, justru di balik kelemahan struktural itu tumbuh kekuatan sosial yang khas, yakni meningkatnya solidaritas dan rasa memiliki bersama (*sense of belonging*) terhadap destinasi wisata. Warga desa memandang Ketakasi bukan sekadar tempat ekonomi, melainkan ruang sosial yang mempersatukan identitas komunitas Sidomulyo. Melalui kegiatan gotong royong, pelatihan, dan festival, tumbuh *bonding social capital*—kepercayaan dan kohesi sosial di antara warga—yang menjadi energi moral bagi keberlanjutan wisata.

Kehadiran *bonding social capital* ini diimbangi oleh *bridging social capital*, yaitu keterhubungan antara kelompok masyarakat dengan aktor eksternal seperti perguruan tinggi, media, dan lembaga swasta. Pemerintah desa dan BUMDes menjadi penghubung antara warga lokal dan pihak luar, menciptakan jejaring sosial yang memperluas peluang kolaborasi. Dalam

konteks teori Putnam (1993), kombinasi antara *bonding* dan *bridging social capital* inilah yang menjadi dasar keberhasilan tata kelola kolaboratif. Ketakasi tidak hanya memperkuat solidaritas internal, tetapi juga membuka akses eksternal bagi pengembangan kapasitas dan sumber daya.

Meski kolaborasi di Sidomulyo menunjukkan potensi besar, ketegangan sosial tetap hadir sebagai bagian dari dinamika lokal. Beberapa warga menilai manfaat ekonomi wisata belum dirasakan secara merata. Kelompok tertentu, terutama yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan, merasa berada di pinggiran arus utama pengembangan wisata. Ketegangan semacam ini menunjukkan adanya *perceived inequality*—persepsi ketidakadilan yang berakar pada perbedaan akses dan informasi. Namun, gejala sosial ini tidak berujung pada konflik terbuka, karena mekanisme komunikasi informal (musyawarah desa dan pertemuan antar kelompok) berfungsi sebagai sarana *conflict absorption*.

Fenomena ini menguatkan argumen bahwa kolaborasi dalam konteks pedesaan Indonesia bersifat deliberatif dan adaptif. Ketika konflik atau perbedaan muncul, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, bukan konfrontasi. Hal ini memperlihatkan bentuk *social learning* dalam tata kelola, di mana masyarakat dan pemerintah desa belajar bersama bagaimana mengelola perbedaan tanpa merusak kohesi sosial. Dengan demikian, kolaborasi di Ketakasi bukanlah kondisi statis, melainkan proses pembelajaran sosial yang terus berkembang.

Selain tantangan partisipatif dan kelembagaan, faktor keberlanjutan juga menjadi perhatian utama. Keberhasilan Ketakasi sangat bergantung pada kemampuan komunitas dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kualitas ekosistem kebun kopi sebagai basis wisata edukatif. Kesadaran ini menandakan pergeseran orientasi dari ekonomi semata menuju keseimbangan ekologi-sosial. Dalam perspektif Community-Based Tourism (Scheyvens, 1999; Nair & Hamzah, 2015), hal ini mencerminkan tingkat kematangan pariwisata berbasis komunitas, di mana masyarakat menjadi subjek utama dalam menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis.

Dari sisi peluang, kolaborasi Ketakasi menghadirkan ruang baru bagi pembentukan identitas sosial desa. Warga kini bangga memperkenalkan Sidomulyo sebagai “desa wisata kopi.” Identitas ini memperkuat kohesi sosial sekaligus meningkatkan legitimasi desa dalam jejaring ekonomi regional. Kolaborasi juga mendorong difusi inovasi sosial, misalnya munculnya pelaku usaha kecil baru di bidang kuliner dan suvenir berbasis kopi, serta meningkatnya partisipasi digital melalui promosi wisata daring.

Dengan demikian, di tengah berbagai tantangan, kolaborasi di Sidomulyo memperlihatkan gejala sosial berupa pembelajaran kolektif (*collective learning*) dan resiliensi komunitas (*community resilience*). Pemerintah desa dan masyarakat tidak menunggu intervensi dari luar, melainkan membangun sistem sosial mereka sendiri yang bersifat adaptif dan inklusif. Proses ini menegaskan bahwa keberlanjutan wisata edukatif di Sidomulyo bukan hanya persoalan kebijakan, melainkan hasil dari interaksi sosial yang menghasilkan kepercayaan, solidaritas, dan inovasi bersama.

Secara teoritik, kasus Sidomulyo memperluas pemahaman tentang *collaborative governance* di tingkat desa. Kolaborasi tidak selalu berjalan dalam struktur kelembagaan formal yang kuat, tetapi dapat berkembang dari basis nilai-nilai sosial lokal seperti gotong royong, kesetaraan, dan rasa memiliki. Sinkronisasi antara teori dan realitas empiris di Sidomulyo menunjukkan bahwa kolaborasi desa wisata merupakan bentuk *governance of trust*, tata kelola berbasis kepercayaan yang tumbuh dari bawah dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Pengembangan Wisata Edukasi Ketakasi di Desa Sidomulyo memperlihatkan bahwa sinergi antara peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat bukan hanya faktor administratif, tetapi merupakan proses sosial yang menciptakan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) berbasis kepercayaan, nilai, dan pembelajaran sosial.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah desa mengalami transformasi fundamental dari birokrasi administratif menjadi aktor kolaboratif yang berperan sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator pembangunan pariwisata. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah desa tidak hanya menghasilkan kebijakan formal melalui peraturan desa, tetapi juga mengelola legitimasi sosial melalui kesepakatan dan norma komunitas. Sebagai fasilitator, desa membuka ruang partisipasi dan membangun kapasitas masyarakat, memperlihatkan gejala sosial berupa meningkatnya kepercayaan diri dan kemampuan inovatif warga. Sebagai katalisator dan dinamisator, pemerintah desa menumbuhkan energi sosial baru melalui partisipasi pemuda, perempuan, dan pelaku ekonomi lokal yang berorientasi pada nilai gotong royong dan kebersamaan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat menunjukkan pergeseran dari partisipasi fungsional menuju partisipasi interaktif dan reflektif. Masyarakat tidak lagi menjadi pelaksana kebijakan, tetapi menjadi mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi wisata edukatif. Gejala sosial yang tampak adalah meningkatnya kesadaran kolektif, kemandirian ekonomi, serta munculnya *social capital* berupa kepercayaan, solidaritas, dan jejaring sosial antaraktor. Partisipasi masyarakat juga menghadirkan inovasi sosial baru, seperti produk kopi olahan, batik motif kopi, dan promosi wisata berbasis digital, yang memperkuat identitas sosial Sidomulyo sebagai desa wisata edukatif.

Sinergi antara kedua elemen tersebut membentuk ruang kolaborasi deliberatif, di mana keputusan dihasilkan melalui musyawarah dan negosiasi sosial antaraktor lokal. Pemerintah desa menyediakan kerangka kebijakan yang adaptif, sementara masyarakat mengisi ruang tersebut dengan kreativitas dan solidaritas. Interaksi ini menciptakan *governance of trust*—suatu bentuk tata kelola berbasis kepercayaan yang lahir dari pengalaman bersama, bukan semata dari regulasi formal.

Dalam perspektif teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007), keberhasilan sinergi ini dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama: *trust building*, *shared motivation*, dan *joint action*. Ketiganya terlihat nyata di Sidomulyo melalui praktik gotong royong, partisipasi lintas generasi, dan adaptasi kelembagaan berbasis nilai-nilai lokal. Sementara dari sudut pandang Waldo (1948) dan Adhiwati (2015), pemerintah desa di Sidomulyo menunjukkan bahwa administrasi publik dapat menjadi ruang moral yang menghidupkan nilai kebersamaan dan kepentingan publik di tingkat lokal.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Sidomulyo bukan hanya menghasilkan pengelolaan wisata yang efisien, tetapi juga menciptakan transformasi sosial menuju tata kelola pariwisata yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Wisata Edukasi Ketakasi bukan sekadar destinasi wisata, tetapi menjadi simbol dari *community empowerment*—kemandirian komunitas yang dibangun dari kolaborasi, kepercayaan, dan inovasi sosial yang tumbuh di akar desa.

Secara teoritik, kasus Sidomulyo memperkaya pemahaman tentang *collaborative governance* di tingkat desa. Kolaborasi yang lahir dari nilai-nilai sosial dan partisipasi warga menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh desain institusi, tetapi oleh kekuatan relasi sosial dan kemampuan komunitas untuk belajar dan menyesuaikan diri. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat di Sidomulyo menjadi model empiris yang menggambarkan bagaimana pariwisata edukatif dapat menjadi wahana pembelajaran sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kohesi sosial di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiwati, M. (2015). *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *The Canadian Geographer*, 24(1), 5–12. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90082-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90082-8)
- Cole, S. (2006). Information and empowerment: The keys to sustainable tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(6), 629–644. <https://doi.org/10.2167/jost607.0>
- Dwight Waldo. (1948). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration*. New York: Ronald Press.
- Firdaus, M., & Widyastuti, A. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 101–116. <https://doi.org/10.33701/jip.v7i2.2341>
- Handayani, R. (2024). *Motivasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan wisata berbasis partisipasi di Indonesia*. *Jurnal Pengembangan Pariwisata*, 10(1), 25–37. <https://doi.org/10.24843/jpp.v10i1.2024>
- Hidayat, R., & Djadjuli, R. D. (2020). Peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata Curug Kembar di Desa Raksabaya. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 12(1), 77–88.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. Chicago: ACTA Publications.
- Lane, B. (1994). Sustainable rural tourism strategies: A tool for development and conservation. *Journal of Sustainable Tourism*, 2(1–2), 102–111. <https://doi.org/10.1080/09669589409510687>
- Nair, V., & Hamzah, A. (2015). Successful Community-Based Tourism Approaches for Rural Destinations: The Asia Pacific Experience. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 7(5), 429–439. <https://doi.org/10.1108/WHATT-06-2015-0023>
- Patadungan, F., Tasik, H. H., & Purwanto, J. (2020). *Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Pulisan, Kabupaten Minahasa Utara*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 145–158. <https://doi.org/10.35797/jap.v6i2.456>
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putra, A. W., Hasim, M., & Adianto, D. (2022). *Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kecamatan Rupert Utara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(3), 201–215. <https://doi.org/10.33369/jips.v8i3.2022>
- Ramdayanti, D., Argenti, A., & Marsingga, R. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui peran pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 245–257. <https://doi.org/10.23917/jish.v10i2.16854>

- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)
- Scheyvens, R. (2011). *Tourism and poverty*. London: Routledge.
- Sri Mulyani, D., & Basrowi. (2023). Modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Sidoarjo. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(2), 133–145.
- Sumardjo. (2012). *Kepemimpinan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: IPB Press.
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493–504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>
- Triananda, R., Maweikere, L., & Memah, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Desa Bahoi, Sulawesi Utara. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 5(1), 41–54.
- UNWTO. (2020). *Tourism and rural development: A report on sustainable tourism practices*. Madrid: United Nations World Tourism Organization.
- Uhai, R. (2021). Peran Organisasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Kalimantan Timur. *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan*, 12(3), 203–215.
- Uphoff, N. (1992). *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Wahyuni, D., & Sari, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Pariwisata*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.24843/jpp.v8i1.2020>